

BAB II

KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Pengertian Pendidikan

Dalam pengkajian khasanah pemikiran pendidikan, terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu: pedagogi dan pedagogik. Pedagogi berarti pendidikan. Sedangkan pedagogik artinya ilmu pendidikan.¹

Selanjutnya, hingga detik ini definisi pendidikan (pedagogi) itu sendiri banyak ragamnya yang patut kita ketahui sebagai kekayaan intelektual kita. Beberapa definisi tentang pendidikan tersebut diantaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Prof. Langeveld, seorang pakar pendidikan dari Belanda, mengemukakan bahwa, pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.² Dalam GBHN 1973, dikemukakan pengertian pendidikan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang

¹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) cet. II, h.1

² Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik; Dasar-Dasar Ilmu Mendidik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.3-4

dilaksanakan di dalam maupun diluar sekolah, dan berlangsung seumur hidup.³

Kemudian, definisi pendidikan juga dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan bahwa, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, (intelekt), dan tubuh anak dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.⁴ Menurut Driyarkara, pendidikan didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik. Pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda.⁵

Dalam *Dictionary of Education* juga dikemukakan bahwa, definisi pendidikan adalah proses dimana seorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.⁶ Hal yang sama juga dikemukakan oleh

³ *Ibid.*, h. 4

⁴ Fuad Ihsan, *Op.cit.*, h.4

⁵ *Ibid.*, h. 4

⁶ *Ibid.*, h. 4

Crow and Crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.

Dari berbagai ragam definisi tentang pendidikan di atas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai:

- a. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan.
- b. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dalam pertumbuhannya.
- c. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat.
- d. Suatu pembentukan karakter, kepribadian dan kemampuan anak-anak dalam menuju kedewasaan.⁷

Selanjutnya, bila ditinjau dari segi fungsinya, objek ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, objek formal. Yaitu bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan riset pendidikan. Kedua, Objek material. Yaitu aspek-aspek atau hal-hal yang menjadi garapan langsung riset pendidikan. Objek formal ilmu berkenaan dengan bidang yang menjadi keseluruhan ruang lingkup garapan sebuah ilmu. Sedangkan objek material

⁷ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan, suatu Pengantar*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), h.45

ilmu berkenaan dengan aspek-aspek yang menjadi garapan penyelidikan langsung ilmu yang bersangkutan.⁸

Dengan demikian, dapat terjadi bahwa sekelompok cabang ilmu mempunyai objek formal yang sama, misalnya manusia. Tetapi, setiap cabang ilmu mempunyai objek material yang berbeda. Misalnya, antropologi mempunyai objek material asal usul, perkembangan, cirri-ciri spesies atau ras manusia.

Sedangkan objek formal ilmu pendidikan adalah pendidikan, yang dapat diartikan secara maha luas, sempit dan luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Dalam pengertian yang maha luas, pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup (*Life long*), sejak lahir (bahkan sejak awal hidup dalam alam kandungan) hingga mati atau meninggal dunia.⁹

Selain itu dalam pengertian yang maha luas, tempat berlangsungnya pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup tertentu dalam bentuk sekolah, tetapi berlangsung dalam segala bentuk lingkungan hidup

⁸ *Ibid.*, h. 45

⁹ *Ibid.*, h. 45

manusia. Pendidikan sebagai pengalaman belajar berlangsung baik dalam lingkungan budaya dalam masyarakat hasil rekayasa manusia manapun dalam lingkungan alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa manusia. Pengalaman belajar tidak saja terjadi dalam dunia persekolahan, tetapi juga dalam dunia permukiman, perdagangan, perindustrian, peribadatan, dan pada kehidupan sosial lainnya.

Di samping tidak ada batas waktu dan tempat, dalam pengertian yang maha luas, pendidikan tidak terbatas pula dalam bentuk kegiatannya, pendidikan sebagai pengalaman belajar mempunyai bentuk, suasana dan pola yang beraneka ragam. Pendidikan dapat berupa pengalaman belajar yang terentang dari bentuk-bentuk yang terjadi dengan sendirinya dalam hidup, yang kehadirannya tidak disengaja, berlangsung dengan sendirinya, maupun yang disengaja.

Dalam pengertian yang maha luas, kemahaluasan pengertian pendidikan tersirat pula tujuan pendidikannya. Setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah (*Self Directed*) kepada pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada diluar pengalaman belajar, tetapi terkandung dan melekat didalamnya. Misi atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang.¹⁰

Dan kaum pragmatic dengan tokohnya seperti John Dewey, cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas dan mengecam praktek pendidikan

¹⁰ *Ibid.*, h. 45-49

di sekolah yang diselenggarakan pada zamannya. Pada umumnya, mereka mengecam praktek pendidikan di sekolah karena di sekolah berlangsung praktek dehumanisasi, yaitu proses pengikisan martabat kemanusiaan. Sekolah terasing dari kehidupan nyata. Pola hubungna guru dan murid adalah otoriter. sehingga, kurang berlangsung perkembangan individu secara optimal.

Kecaman yang radikal datang dari van Illich, yang dituangkan dalam *Deschooling Society* (Masyarakat tanpa kelas). Ivan Illich mempunyai gagasan yang terang-terangan mengutuk pendidikan yang dilembagakan dalam bentuk sekolah. Dalam kecamannya itu, van Illich yakin bahwa, sekolah-sekolah dengan sendirinya menjadi tidak memadai, dan hanya mendorong kepada mengasingkan siswa dari hidup. Selanjutnya, dia yakin bahwa tujuan peniadaan sekolah dalam masyarakat akan menjamin siswa dapat memperoleh kebebasan dalam belajar, tanpa harus memperjuangkan untuk memperolehnya untuk dari masyarakat. Setiap orang harus dijamin kepribadiannya dalam belajar, dengan harapan dia akan menerima kewajiban membantu orang lain untuk tumbuh sesuai dengan kepribadiannya.¹¹ Ivan Illich berpendapat bahwa, suatu sitem pendidikan yang baik harus mempunyai tiga tujuan: pertama, memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat

¹¹ *Ibid.*, h. 45-49

dengan mudah melakukannya. Ketiga menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan.

Selanjutnya dalam pengertian yang sempit, pendidikan adalah sekolah atau persekolahan (*schooling*). Sekolah adalah lembaga pendidikan formal sebagai salah satu hasil rekayasa dari peradaban manusia, disamping keluarga, dunia kerja, Negara dan lembaga keagamaan. Sekolah sebagai hasil rekayasa manusia diciptakan untuk menyelenggarakan pendidikan, penciptaannya berkaitan erat dengan penguasaan bahasa tertulis dalam masyarakat, yang berkembang makin sistematis, dan meningkat.

Oleh karena itu, pendidikan dalam arti sempit adalah pengaruh yang diupayakan dan diurekayasa sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka. Rekayasa tujuan pendidikan menghasilkan perumusan tujuan pendidikan yang bersifat pengembangan pribadi, sosial, dan ekonomi.¹² Tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat pengembangan pribadi merupakan tujuan langsung proses pendidikan dan berisi rumusan tentang tujuan-tujuan pengembangan individu dalam penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dalam bentuk taksonomi tujuan-tujuan pendidikan.

Tujuan sosial pendidikan merupakan tujuan tak langsung dan berisi rumusan tentang peranan pendidikan dalam pemeliharaan, pengembangan,

¹² *Ibid.*, h. 49

dan perubahan kehidupan sosial budaya. Sedangkan, tujuan ekonomi pendidikan adalah perumusan tentang peranan pendidikan dalam perkembangan pendidikan bidang ekonomi.

Kaum behavioris dengan para tokoh-tokohnya, seperti B.F Skinner, B. Watson, dan sebagainya, cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti sempit. Sekurang-kurangnya, mereka mempunyai pandangan yang optimis terhadap peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, dan pesimis atau meragukan peranan pendidikan dalam bentuk-bentuk pengalaman belajar dalam hidup yang tidak dilembagakan.

Mereka mempunyai keyakinan yang sangat kuat tentang masa depan sekolah sebagai hal ihwal yang berkenaan dengan rekayasa perubahan tingkah laku. Sekolah hendaknya dirancang seperti halnya para insinyur yang bekerja merancang sebuah mesin yang canggih. Sekolah sebagai lembaga berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku harus didasarkan pada kurikulum yang dirancang secara ilmiah dan bentuk-bentuk kegiatannya harus diorganisasikan dengan penuh perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin.¹³

Selanjutnya ada tiga prinsip utama yang mendasari sekolah dalam menyelenggarakan proses rekayasa perubahan tingkah laku. Diantaranya adalah pertama, pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan disekolah merupakan rekayasa

¹³ *Ibid.*, h. 46-48

perubahan tingkah laku yang terprogram secara cermat. Dan ketiga, masa depan sekolah sebagai lembaga rekayasa perubahan tingkah laku yang terprogram adalah cerah karena mempunyai peranan yang besar dalam mencapai kemajuan. Sering pula dikemukakan bahwa sekolah adalah agen dari instrument vital dalam pembangunan untuk mencapai kemajuan.

Optimisme kaum behavioris tentang sekolah antara lain dikemukakan oleh John B. Watson, seorang peletak dasar ajaran behavioris modern, sebagai berikut:

“Berilah saya selusin anak yang sehat, kondisi badannya baik, dan dunia pribadiku yang terarah kepada upaya mendidik mereka dan saya akan jamin untuk memilih anak yang manapun melihatnya menjadi seorang spesialis apapun yang akan saya pilih, apakah dokter, ahlik hukum, seniman, saudagar dan bahkan menjadi pengemis dan pencuri, tak peduli bakatnya, minatnya, kecenderungannya, kemampuannya, pekerjaan dan keturunan rasnya.”¹⁴

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa, pengaruh lingkungan dalam bentuk latihan atau pengajaran terhadap pembentukan kemampuan-kemampuan seseorang sangat menentukan, dan dengan demikian mengajarkan paham determinisme lingkungan. B.F Skinner, salah seorang pakar behaviorisme terkemuka, meletakkan dasar pada determinisme lingkungan dalam teori pendidikan.

Skinner dalam *beyond Freedom and dignity* antara lain menyatakan bahwa: *“Pengaruh-pengaruh lingkungan membentuk kita seperti apa yang*

¹⁴ Ibid., h. 43-49

ada sekarang ini."¹⁵ Dia juga menyatakan bahwa kita dikontrol oleh lingkungan kita dan sebagian besar lingkungan membantu kita seperti apa yang dapat kita capai sekarang ini. Meskipun demikian, kita dapat selalu mempengaruhi lingkungan kita. Kita sekaligus dikontrol dan mengontrol. Pada akhirnya kita mencapai keadaan yang lebih baik apabila kita memahami hal tersebut dan perilaku kita aktif mengikutinya.

Hal ini mengandung arti perlunya teknologi perubahan tingkah laku manusia. Oleh Karena itu, penggunaan prinsip-prinsip rekayasa tingkah laku dalam pendidikan harus diupayakan secara ilmiah, seperti yang dilakukan dalam rekayasa sebuah sebuah mesin yang canggih. Pengajaran di sekolah haruslah dikelola secara terprogram berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur ilmiah. Sehubungan dengan hal itu. Guru mempunyai peranan yang sangat penting bahkan sangat menentukan di dalam mengarahkan proses belajar mengajar, tetapi berperan pula dalam merancang dan mengontrol proses belajar. Apabila guru dapat melaksanakannya secara efektif dan efisien di dalam merekayasa pengajaran di sekolah. Maka dengan sendirinya akan berlangsung proses belajar mengajar yang efisien dan efektif. Sehingga pada akhirnya terwujudlah pola tingkah laku yang diharapkan. Apabila sekolah mampu berfungsi sebagai lembaga rekayasa perubahan pola tingkah laku

¹⁵ *Ibid.*, h. 47

yang ampuh maka sekolah mempunyai kedudukan dan peran yang menentukan di dalam memacu kemajuan masyarakat modern.¹⁶

2. Pengertian Multikultural

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara epistemologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹⁷

Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus dipersamakan atau, setidaknya, tidak dipertentangkan antara konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.47-49

¹⁷ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h.75

¹⁸ *Ibid.*, h. 75-76

Parsudi Suparlan melihat bahwa dalam perspektif tersebut, kebudayaan adalah sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus diperhatikan bersama menyangkut kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu bekerja melalui pranata-pranata sosial. Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap ke dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kehidupan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Multikultur dari sebgaiian orang blum sepenuhnya dipahami sebagai suatu yang *given* sebagai *takdir Allah*. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*.²⁰ (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia dari dua hal yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan. Dari keberadaan tersebut dapat melahirkan keturunan yang

¹⁹ *Ibid.*, h.76

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Indah Press 1994), h.847

berbeda-beda pula. Keberadaan menjadikan manusia mampu membentuk suku-suku menjadi bangsa-bangsa yang berbeda.²¹

Multikulturalisme telah merupakan wacana bagi para akademisi maupun praktisi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia dewasa ini. Demikian pula telah muncul pendapat mengenai cara-cara pemecahan konflik horizontal yang nyaris memecahkan bangsa Indonesia dewasa ini dari sudut kebudayaan dan bukan melalui cara-cara kekerasan ataupun cara-cara lain yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam.²²

Dalam kaitannya dengan masalah multikulturalisme, Madar Hilmy berpandangan, bahwa bagi bangsa Indonesia, adanya keragaman budaya merupakan kenyataan sosial yang sudah niscaya. Meski demikian, hal itu tidak secara otomatis diiringi penerimaan yang positif pula. Bahkan, banyak fakta yang justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya: keragaman budaya telah memberi sumbangan terbesar bagi munculnya ketegangan dan konflik. Sehingga, tak pelak modal sosial (*social capital*) itu justru menjadi kontraproduktif bagi penciptaan tatanan kehidupan berbangsa yang damai, harmoni dan toleran. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran multikulturalisme agar potensi positif yang

²¹ Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*, (Surabaya: STAIN Salatiga Press dan Jp Books, 2007) h.1

²² H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003) h. 162

terkandung dalam keragaman tersebut dapat teraktualisasi secara benar dan tepat.²³

Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme dimaksud. Karena, dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya bisa berperan sebagai '*jurubicara*' bagi terciptanya fundamen kehidupan multikultural yang terbebas dari kooptasi negara. Hal itu dapat berlangsung apabila ada perubahan paradigma dalam pendidikan, yakni dimulai dari penyeragaman menuju identitas tunggal, lalu ke arah pengakuan dan penghargaan keragaman identitas dalam kerangkepenciptaan harmonisasi kehidupan.²⁴

Sebenarnya Indonesia memiliki *track record* yang tidak terlalu jelek dalam pengelolaan keanekaragaman sosial budaya. Sejarah kehidupan kehidupan bangsa Indonesia selalu diwarnai oleh sikap toleransi dan asimilasi. Kedatangan unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat hampir tidak menemui gesekan sosial yang berarti. Masyarakat tidak sekedar mudah beradaptasi terhadap nilai-nilai baru itu, tetapi juga berhasil mengadopsinya ke dalam struktur sosial budaya mereka.²⁵

Hal ini dibuktikan, misalnya, oleh kenyataan sejarah betapa masyarakat Jawa sangat mudah menggabungkan dua atau lebih sistem nilai yang berbeda yang kemudian turut membentuk dan mengolah peradaban Jawa

²³ Choirul Mahfud, *Op.cit.*, h.78-79

²⁴ *Ibid.*, h. 79

²⁵ *Ibid.*, h. 81

menjadi *indic*. Sehingga tidaklah mengherankan bila candi Hindu dan Budha berdiri saling berdampingan, dan raja-raja Jawa disebut sebagai 'Siswa Budha' sebagai wujud dari representasi dialog dua peradaban Hind Budha. Kehidupan toleransi semacam ini telah berlangsung di Jawa selama kurang lebh satu millenium sebelum kemudian nilai-nilai Islam turut mewarnai kehidupan sosio-kultural masyarakat Jawa pada abad ke-14.²⁶

Kesadaran akan adanya keberagaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Akan tetapi tentu, tidak cukup hanya sampai disitu. Bahwa suatu kemestian agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman, mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan dielaborasi secara positif. pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme.

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip "bhineka tunggal ika" seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

²⁶ *Ibid.*, h.81

Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan multikulturalisme ini perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikulturalisme ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar.

Sebagai energi positif, multikultur dipahami sebagai rahmat, mengingat di satu sisi Allah telah menciptakan manusia dengan *physical and spiritual force* berbeda. Keberadaan tersebut dapat dijadikan sebagai pelengkap satu sama lain. Modal kelengkapan karakteristik tersebut seakan menjadikan kekuatan untuk meniadakan kekurangan/kelemahan manusia. Dengan demikian, kelemahan dan kekurangan akan ditukar dengan kekuatan dan keunggulan. Untuk membangun kekuatan dan keunggulan tersebut, diperlukan upaya sistematis dan konstruktif melalui jalur yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan. Hanya saja, beberapa tahun dalam hitungan sejarah, masyarakat Indonesia terlewat asyik memobilisir masyarakat. Maklum saja, mengingat pasca perjuangan melawan penjajah masyarakat dibuat serba sama, meskipun sebenarnya kompak dan bersatu tidak selamanya identik dengan kesamaan. Kalau serba sama tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menghilangkan nilai alamiah yang dimiliki manusia yang memang serba berbeda. Serba berbeda memang tidak

selamanya menghadapi perilaku yang serba beda pula. Hal yang menjadi pangkal tolak tersebut adalah bagaimana dengan keberbedaan tersebut dapat dijunjung tinggi oleh masing-masing, sehingga tidak lagi keberbedaan menjadi bara api antar kelompok masyarakat.²⁷

3. Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural (multicultural education) sesungguhnya bukanlah pendidikan khas Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Barat. Kanada, Amerika, Jerman, dan Inggris adalah beberapa contoh negara yang mempraktikkan pendidikan multikultural. Ada beberapa nama dan istilah lain yang digunakan untuk menunjuk pendidikan multikultural. Beberapa istilah tersebut adalah: intercultural education, interethnic education, transcultural education, multiethnic education, dan cross-cultural education.²⁸

Untuk konteks Indonesia, pendidikan multikultural baru sebatas wacana. Sejak tahun 2002 hingga sekarang ini wacana pendidikan multikultural berhembus di Indonesia. Beberapa tulisan di media, seminar, dan simposium cukup gencar mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Simposium internasional di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada tanggal 16-19 Juli 2002 adalah salah satu contoh

²⁷ Maslikhah, *Op.cit.*, h.4

²⁸ <http://maulanusantara.wordpress.com/2009/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/>

simposium yang mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Seminar kali ini juga memiliki concern yang sama, bahwa wacana pendidikan multikultural perlu terus-menerus dihembuskan, bahkan perlu diujicobakan.²⁹

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan dengan *mografis* dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Definisi ini dengan demikian terkait dengan kebudayaan dan kultur lingkungan. Ini berarti pembahasan multikultural tak dapat dipisahkan dari budaya dan lingkungan sekitar masyarakat.³⁰

Seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat bernama Prudence Crandall (1803-1890) secara intensif menyebarkan pandangan tentang pendidikan multikulturalisme, yaitu pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari keragaman suku (etnis), ras, agama, (aliran kepercayaan), dan budaya (kultur).³¹

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan

²⁹ <http://maulanusantara.wordpress.com/2009/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/>

³⁰ Said Agil Husain Al Munawar, *Aktualisa Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam Cetakan II*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005) h. 208

³¹ Imam Machali, Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi (Buah Pikiran seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004) h. 264

diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:

*Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.*³²

Sebagaimana dikemukakan Tilaar dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti inipernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.³³

Apabila multikulturalisme merupakan wacana dalam bidang kebudayaan dalam arti luas seperti pengembangan identitas suatu kelompok

³² Muhaemin El-Ma'hady dalam *www. re-searchengines.com*. Diunduh pada hari sabtu, 28 agustus 2009

³³ Said Agil Husain Al Munawar, *Op.cit.*, h. 208-209

masyarakat, demikian pula dalam pengembangan suatu Negara bangsa (*nation-state*) diperlukan rasa identitas dari kelompok bangsa itu. Selanjutnya suatu bangsa hanya dapat bertahan karena mempunyai kekuasaan (*power*). Kekuasaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat serta mengikat masyarakat itu dengan satu kesatuan kehidupan. Kekuasaan dengan demikian hanya dapat dikembangkan dalam lingkungan kebudayaan dalam arti yang luas. Oleh sebab itu juga pendidikan tidak terlepas dari gwacana tersebut di atas. Itulah juga yang disebut tinjauan studi kultural mengenai pendidikan, yang melihat proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembudayaan.³⁴

Multikultural merupakan suatu tuntutan pedagogis dalam rangka studi kultural yang melihat proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Upaya kita untuk membangun masyarakat indonesia baru yang multikultural hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia indonesia yyang bebas, tetapi juga sekaligus terikat kepada suatu kesepakatan bersama untuk membangun suatu masyarakat indonesia bersatu dalam wacana kebudayaan indonesia yang terus menerus berkembang.

Pendidikan multikulturalisme yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama. Dengan demikian

³⁴ Imam Machali, Musthofa, *Op.cit.*, h. 264-265

pendidikan multikulturalisme menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datang dan berbudaya apapun dia.

Meminjam pendapat Andersen dan Causher, bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). Kemudian, bagaimana kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.³⁵

Menurut penelitian Banks terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural di Amerika.³⁶

a. Integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*)

Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalam kurikulum dan di mana atau bagian apa dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Isi kurikulum tersebut antara lain berkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi berbagai prasangka di dalam perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis-etnis tertentu dan di dalam materi apa prasangka-prasangka tersebut dapat dikemukakan. Di dalam kaitan ini diperlukan studi mengenai berjenis-jenis kebudayaan dari kelompok-

³⁵ Choirul Mahfud. *Op.cit.*, h. 167

³⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*. hal. 138-140.

kelompok etnis. Di dalam kaitan *ethnic studies movement* sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat. Termasuk di dalam gerakan ini adalah menulis dan mengumpul-kan sejarah dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat.

b. Konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*)

Di dalam kaitan ini dipelajari mengenai sejarah perkembangan masyarakat Barat dan perlakuannya, serta reaksi dari kelompok etnis lainnya. Sejarah berisi hal-hal yang positif maupun yang negatif yang perlu diketahui oleh peserta didik di dalam upaya mengerti kondisi masyarakatnya dewasa ini.

c. Pengurangan Prasangka (*prejudice reduction*)

Prasangka rasial memang dihidupkan sejak kanak-kanak. Di dalam pergaulan sesamanya mulai ditanamkan prasangka-prasangka yang positif maupun yang negatif terhadap sesamanya. Dengan pergaulan antar kelompok yang intensif, prasangka-prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerja sama yang erat dan saling menghargai. Peringatan akan pahlawan-pahlawan, tanpa membedakan warna kulit dan agamanya merupakan cara-cara untuk menanamkan sikap positif terhadap kelompok etnis tertentu. Nilai-nilai tersebut dimasukkan di dalam kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum itu sendiri. Akhirnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ditransformasikan di dalam perbuatan,

misalnya di dalam memperingati hari-hari besar dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sekolah atau masyarakatnya.

d. Pedagogik kesetaraan antar manusia (*equity pedagogy*)

Kebudayaan berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan karena sikap yang tidak adil di dalam masyarakat. Oles sebab itu, diperlukan pedagogik yang memperhatikan antara lain kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan dengan kelompok anak-anak dari golongan menengah atau golongan atas. Demikian pula, ternyata ada kaitan antara intelegensi anak dengan kehidupan sosialnya. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin biasanya terhalang perkembangan intelegensinya dan oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan lebih seksama tentang perbaikan sosial ekonomi dari peserta didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang dilupakan.

e. Pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*)

Keempat pendekatan tersebut di atas semuanya bermuara kepada pemberdayaan kebudayaan sekolah. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut di atas dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya lahir kebudayaan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sekolah haruslah merupakan suatu motor penggerak di dalam perubahan struktur masyarakat yang

timpang karena kemiskinan ataupun tersisih di dalam budaya "mainstream" masyarakat.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek) dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki lima ciri yaitu:

- a. Peserta didik dalam keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
- b. Mempunyai keinginan untuk berkembang kearah dewasa.
- c. Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.
- d. Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.

Pendidikan multikultural mempersiapkan siswa untuk aktif sebagai warga negara dalam masyarakat yang secara etnik, kultural, dan agama yang beragam. Pendidikan ini diperuntukkan semua siswa, tanpa memandang latar belakang etnisitas, agama dan kebudayaan. Ia memberikan keuntungan pada siswa berupaya sosialisasi dalam konteks kebudayaan *mainstream* maupun minoritas. Dalam pendidikan multikultural, semua pengalaman dan sejarah kelompok-kelompok kultural dihargai dan diajarkan dalam sekolah, yang menguatkan inutegritas dan pentingnya kelompok-kelompok tersebut dan

kelompok-kelompok siswa yang mengidentifikasi dengan kelompok yang lebih besar. Dengan membangkitkan kesadaran dan pemahaman multikultural, semua siswa memperoleh kemampuan untuk memfungsikan dirinya secara efektif dalam situasi lintas budaya, lintas agama, lintas etnik, dan seterusnya.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti, atau politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian

konflik dan mediasi, HAM, demokratis, pluralitas, kemanusiaan universal dan subyek-subyek lain yang relevan.

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru pasca kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 baru disadari bahwa, masyarakat terdiri dari berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang diciptakan.

Melalui pendekatan inilah, dari SD sampai Perguruan Tinggi, Amerika Serikat berhasil membentuk bangsa yang dalam perkembangannya melampaui masyarakat induknya yaitu Eropa. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.

B. PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal dengan lima pendekatan, yaitu; *pertama*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme penuh dengan

kebaikan. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. *Ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. *Keempat*, pendidikan dwi-budaya. *Kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.³⁷

Kajian ini lebih banyak menekankan kepada pendekatan yang kelima, suatu pendekatan yang mengandung beberapa perbedaan dasar dari empat pendekatan lainnya. Pendekatan pertama hingga keempat berasal dari tradisi ilmu kependidikan mengenai dwi-budaya dan pendidikan multikultural. Sedangkan pendekatan yang kelima bermula dari konsep-konsep kunci mengenai pendidikan dan kebudayaan, yakni konsep-konsep yang bersumber dari antropologi. Konseptualisasi pendidikan multikultural dikembangkan dari konsep-konsep itu sendiri, bukan dari program-program sekolah yang sedang berjalan atau tengah diwujudkan, dimana bobot dan mutu yang bersifat multikultural ditambahkan pada program-program tersebut. Dalam pendekatan ini, menurut pandangan antropolog bahwa pendidikan adalah dasar suatu kebudayaan.³⁸

Walaupun pendidikan itu dapat diperdebatkan lebih lanjut relevansi dan keberlakuannya, baramngkali perlu dikemukakan secara jelas pendapat Spindler yang memandang pendidikan sebagai trannsmisi kebudayaan sebagai berikut. Antropologi memandang pendidikan sebagai bagian dari sosialisasi

³⁷ *Ibid.*, h. 213-214

³⁸ *Ibid.*, h.214

yang dialami manusia, di mana orang muda mempersiapkan untuk menyesuaikan diri dengan baik ke dalam lingkungan internal komunitas di mana mereka hidup dan menjadi dewasa, dan menjadi bagian dari lingkungan eksternal di mana hidup komunitas manusia yang lebih luas dan total.³⁹

Berkaitan dengan hal di atas, Godenough mengomentari kebudayaan secara gamblang. Dia mengungkapkan bahwa: berbagai standar bagi memersepsi, mengevaluasi, meyakini dan melakukan. Mewujudkan hubungan dengan orang lain sebagai hasil dari pengalamannya dengan tindakan dan harapan tersebut berbeda pada sejumlah orang, dengan demikian tentu mereka memiliki kebudayaan yang berbeda. Seseorang tidak hanya harus mewujudkan sistem standar yang berbeda bagi sejumlah orang yang berbeda-beda melainkan memiliki kompetensi dalam mengakomodir berbagai kebudayaan yang dihadapi.⁴⁰

Pandangan Spindelr dan godenough di atas relevan untuk dikemukakan di sini mengingat kepada dua alasan. Pertama, definisi Spindelr mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan, meski masih mengandung warna kuat paradigma struktur-fungsionalisme klasik yang keberlakuannya mungkin terbatas pada *balack box* masyarakat dan kebudayaan sederhana secara tipologis, tetap relevan dan penting untuk mendiskusikan prose belajar mengajar dalam kelas atau sekolah sebagai

³⁹ *Ibid.*, h. 214

⁴⁰ *Ibid.*, h. 215

minoritas. *Kedua*, pendapat Goodenough mengandung isyarat yang kuat bagi pentingnya bahasa dalam mengembangkan kompetensi sistem standar atau kebudayaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua pertautan yang kuat antara pandangan Spindler dan Godenough dalam mendiskusikan lebih jauh konsep pendidikan multikultural tersebut.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural,⁴¹ yaitu:

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidikan dari asumsi mereka bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru lebih luas dari pada itu, semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal dan luar sekolah.

Kedua, kita tidak lagi terbatas pada pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Berarti, kita tidak perlu mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana selama ini barangkali kita terbiasa melakukannya. Secara tradisional para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan

⁴¹ *Ibid.*, h. 215

kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa dan berbagai pemahaman mengenai berbagai situasi dimana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. Kendati kelompok etnik mungkin memiliki sama standar tertentu, para anggotanya juga dapat dipilah-pisahkan ke dalam sub-sub yang terlibat dalam kegiatan bersama yang khusus pula, misalnya kegiatan pekerjaan, keagamaan, atau reaksi. Sebagian dari kegiatan ini barangkali lintas batas etnik, sehingga dapat dilihat bahwa anggota-anggota kelompok etnik tertentu akan mempresentasi suatu rentang kebudayaan yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan multikultural jika pendekatan ini dipahami dan diadopsi oleh para penyusun program-program pendidikan multikultural, akan melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara *stereotip* menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah

antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. Akhirnya, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi-budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi kebebasan individu untuk sepenuhnya bersifat diversitas kebudayaan. Pendekatan kelima ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung potensi pendidikan multikultural untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Dalam konteks ke-Indonesiaan dan ke-bhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terejawantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang menyatakan, bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan

agama. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
2. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
3. Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
5. Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang memnuntunya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.⁴²

Bila penjelasan di atas ditarik di dalam dunia pendidikan, maka masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan

⁴² Muhaemin El-Ma'hady dalam *www. re-searchengines.com*. Diunduh pada hari sabtu, 28 Februari 2009, jam 09.59 wib.

masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan.

C. DASAR-DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

1. Proses Pengembangan (*developing*)

Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan (*developing*). Yaitu sebagai suatu proses yang tidak dibatasi oleh ruang, wakt, subjek, objek, dan realisasinya. Proses ini biasa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan berkaitan dengan siapa saja.⁴³

2. Mengembangkan Seluruh Potensi Manusia

Pendidikan multikulturalisme mengembangkan seluruh potensi manusia, yaitu potensi yang sebelumnya sudah ada dan dimiliki manusia. Yaitu potensi intelektual, potensi sosial, religius, moral, ekonomi, teknis, kesopanan, dan tentunya potensi budaya.⁴⁴

Pendidikan yang bermutu mengembangkan potensi diri setiap anak untuk menjadi individu yang mandiri dan berguna bagi masyarakat. Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai

⁴³ Imam Machali musthofa, *Op.cit.*, h. 226

⁴⁴ *Ibid.*, h.266

kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam pendidikan. Ini berarti bahwa institusi pendidikan harus memperhatikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan latar belakang anak dari segi agama, ras, golongan, kelas sosial, kemampuan akademik, jenis kelamin dan sebagainya.

3. Pendidikan yang Menghargai Heterogenitas dan Pluralitas

Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas. Pendidikan yang menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama, yaitu sifat yang sangat urgen untuk disosialisasikan.⁴⁵

Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural secara luas dimaksudkan untuk memberikan perhatian akademik terhadap kelompok yang termarginalkan dan memberikan pengetahuan budaya mengenai kelompok tersebut pada kelompok mayoritas. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan dan konflik yang mungkin timbul.

⁴⁵ *Ibid.*, h.266-267